

PEMBUKA CERITA

MENGAPA PERATURAN PERDAGANGAN MENUAI UNJUK RASA?

Lee Kyung Hae berada jauh dari rumahnya ketika dia memutuskan bunuh diri. Petani dan mantan ketua Federasi Petani Korea Selatan yang berusia 56 tahun ini memilih mati di Cancun, Meksiko, pada tanggal 10 September 2003, saat pembukaan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation* --WTO). Ia menusukkan tubuhnya pada barikade dari baja yang tajam, yang dipasang oleh pasukan keamanan Meksiko untuk menghambat para pengunjuk-rasa memasuki ruang sidang resmi. Walaupun sudah dilarikan ke rumahsakit, Lee akhirnya meninggal.

Sebelumnya, Lee pernah melakukan unjuk-rasa selama berminggu-minggu di depan gedung Markas Besar WTO di Jenewa, Swiss. Ia membagikan pamflet berisi informasi tentang nasib buruk yang menimpa petani dan masyarakat pedesaan akibat peraturan WTO di bidang pertanian. Tindakan Lee mengejutkan semua pihak yang hadir dalam konferensi itu, walaupun belum ada penjelasan mengapa ia melakukannya. Ada dugaan bahwa Lee sangat kecewa dengan ketentuan-ketentuan WTO yang merugikan petani kecil dan ingin menegaskan pesan tersebut kepada dunia.

Aksi bunuh diri Lee mungkin adalah puncak dari unjuk-rasa damai yang dilancarkan ribuan petani, masyarakat adat, dan organisasi-organisasi non-pemerintah (ORNOP) di luar sidang tempat pembukaan konferensi WTO tersebut. Sementara di dalam gedung, ketika Direktur Jenderal WTO, Supachai Panitchpakdi, sedang memberikan sambutan, sekitar 40 wakil ORNOP berdiri dengan kertas karton kecil, menampilkan tulisan "*WTO obsolete*", "WTO anti Pembangunan", dan sebagainya (Khor, 2003a).

Ini bukan unjuk rasa massal pertama kali terhadap WTO. Hampir setiap konferensi menteri WTO diwarnai oleh unjuk rasa dalam kadar yang berbeda-beda. Pada tahun 1999, pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke III di Seattle, Amerika Serikat, unjuk rasa bahkan lebih besar dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk kelompok buruh dan masyarakat biasa. Di luar KTM, juga banyak kampanye dilancarkan untuk mengkritik berbagai peraturan dan pelaksanaan peraturan di WTO.

Mengapakah WTO menuai begitu banyak unjuk rasa dan protes? Lebih tragis lagi, mengapa seorang petani rela mengambil nyawanya sendiri, jauh dari kampung halaman, sekedar untuk memprotes kebijakan perdagangan di WTO?

Pertanyaan tersebut mungkin terjawab apabila kita mengetahui apa itu WTO, bagaimana sistem kerjanya, kemungkinan dan potensi dampaknya pada kehidupan kita, serta apa dampaknya pada negara-negara sedang berkembang. Buku ini berupaya menggambarkan hal-hal tersebut sehingga akan menjadi jelas mengapa WTO menjadi salah satu sasaran protes gerakan masyarakat sipil dan gerakan sosial di tingkat dunia.

Dari awal hendak saya katakan bahwa ini bukanlah buku yang menyajikan ataupun berlandaskan teori ekonomi dan hukum dagang internasional, seperti layaknya buku teks untuk sekolahan. Saya tidak pernah belajar teori ekonomi ataupun hukum internasional. Buku ini menyampaikan informasi, telaah dan pandangan tentang WTO dari kaca mata orang awam saja, dari pengalaman pribadi mengikuti serta mengamati proses-proses antar negara (multilateralisme) dan perumusan kesepakatan di tingkat global seperti WTO. Buku ini ditulis karena setiap warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia berhak mengetahui kesepakatan di tingkat global yang dibuat atas nama mereka oleh para petinggi negara. Kalau kesepakatan itu mendorong seorang Lee bunuh diri, maka kita harus mencermati dan mewaspadai perjanjian global tersebut.

Jadi, tujuan utama buku ini adalah 'menguak mistik' (demistifikasi) tentang WTO. Selama ini WTO dianggap sebagai sesuatu yang sulit dipahami, ada nun jauh disana, bukan urusan kita, tapi urusan para pedagang dan Departemen Perdagangan. WTO bukanlah sesuatu yang mistik, tetapi sesuatu yang nyata, yang perlu kita pahami bersama. Yang terpenting untuk dipahami adalah kesepakatan mengenai perdagangan internasional bukanlah suatu kompromi perdagangan, tetapi merupakan **proses politik**, terutama dalam lembaga antara negara yang bernama WTO ini. Di WTO, yang berunding adalah pemerintah, tetapi yang dirundingkan adalah hak para perusahaan raksasa multinasional untuk mendapatkan akses pasar, kemudahan persyaratan dagang, dan berbagai fasilitas lain.

Maka terjadilah ironi itu: negara harus menjalankan kewajiban di bawah WTO, tetapi perusahaan-perusahaan swasta multinasional yang justru menikmati keuntungan. Demi kepentingan perusahaan-perusahaan raksasa lintas-negara itulah, para pemerintah dipaksa bekerja keras merundingkan peraturan global, kadang-kadang dengan mengorbankan kepentingan rakyat. Perdagangan sudah menjadi sesuatu yang rancu, dari awalnya sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara, kini menjadi tujuan akhir.

Buku ini mencoba menyajikan informasi yang dapat dipahami oleh orang-orang biasa. Banyak istilah teknis yang dicoba diterjemahkan. Walaupun demikian, tujuan menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami bisa jadi tidak tercapai sepenuhnya. Itu mungkin semata-mata kekurangan penulis sendiri. Untuk itu, dengan kerendahan hati mohon anda membuka pintu maaf bagi saya.

Dua bab pertama buku ini mengupas sejarah, proses, dan isi kesepakatan WTO. Bab 1 membahas perjalanan WTO, sebelum ditetapkan, kemudian ketika ditetapkan pada tahun 1995 dan proses perjalanannya setelah itu hingga KTM-V pada tahun 2003.

Bab 2 menyajikan informasi teknis tentang kesepakatan, sistem, serta mekanisme kerja dan organisasi di WTO.

Dua bab berikutnya, Bab 3 dan 4, mengupas lebih rinci dua kesepakatan penting, yaitu di bidang Pertanian dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Kedua kesepakatan ini saya anggap paling penting, yang akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik bagi jutaan petani, maupun puluhan juta konsumen di Indonesia. Hal itu bukan berarti kesepakatan lain tidak penting, tetapi dua kesepakatan ini saya anggap mewakili pemahaman tentang kesepakatan-kesepakatan lain. Selain itu, secara jujur, dua kesepakatan inilah yang saya pelajari lebih rinci dibandingkan yang lain.

Bab 5 membahas beberapa isu baru yang diluncurkan di WTO berkaitan dengan hal-hal yang hampir tidak berhubungan dengan perdagangan, seperti penanaman modal, kebijakan persaingan, dan transparansi dalam pembelanjaan pemerintah. Bersama dengan masalah liberalisasi jasa, isu tersebut akan sangat mengancam kelangsungan pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia. Karena itu, judul bab ini adalah pertanyaan mengenai apakah pembangunan sudah mati? Yang lebih penting, nuansa kembali ke era kolonialisme yang mungkin terjadi ketika WTO menguasai hampir seluruh aspek pembangunan di negara sedang berkembang.

Bab 6 menyajikan komitmen Indonesia di WTO dan dampak serta masalah yang dihadapi. Pesan inti yang disampaikan adalah salah-urus perdagangan dan cara menangani WTO selama ini. Bab ini ditutup dengan usulan langkah-langkah ke depan untuk mensiasati WTO.

Pada Bab 7, kita kembali ke kancah global dengan pembahasan mengenai perlunya pemberontakan Dunia Ketiga, mirip dengan pemberontakan untuk merebut kembali kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa Barat di masa lampau. Tetapi kali ini arena pertarungan adalah WTO, dan yang direbut kembali adalah hak untuk melaksanakan kebijakan pembangunan dan meluruskan peran WTO sebagai wadah multilateral yang haruslah bersikap adil. Bab ini pada dasarnya menunjukkan bahwa negara berkembang sudah berupaya mempengaruhi kesepakatan di dalam WTO, dan memberikan nuansa optimis tentang kenyataan bahwa WTO bukanlah suatu konstitusi yang terpahat dalam batu yang tidak bisa diubah. WTO adalah alat yang harus diubah agar dapat digunakan semua negara secara adil.

Bab 8 menguraikan peran masyarakat sipil dalam mengkritisi WTO dan mempengaruhi pemerintah untuk tidak gegabah membuat kesepakatan baru di WTO. Organisasi-organisasi non-pemerintah beserta kelompok masyarakat

selama ini terus berupaya agar suara dan aspirasi mereka dipertimbangkan dalam WTO. Hal ini mereka lakukan dengan berbagai upaya, dari pendidikan publik, penandatanganan petisi, hingga unjuk rasa masal serta bunuh diri seperti sang petani Korea Selatan tadi. Sejauh mana mereka berhasil, masih harus kita lihat. Tetapi mereka memberikan keragaman nuansa perdebatan, sehingga menyajikan pendapat lain kepada masyarakat yang selama ini yang tidak mendapatkan informasi seimbang.

Bab 9 menyambung optimisme di bab sebelumnya, yaitu upaya membangun dunia yang lebih baik, yang lebih adil. Salah satunya dengan meluruskan kerancuan mengenai perdagangan bebas yang selama ini dianut. Selama ini masyarakat diberi tahu oleh para pakar ekonomi, para petinggi negara, dan lembaga internasional, bahwa tidak ada jalan lain: liberalisasi perdagangan dan ekonomi adalah jalan satu-satunya menuju kemakmuran. Pada bab inilah saya ingin menyatakan bahwa WTO ataupun globalisasi ekonomi secara umum bukanlah suatu keniscayaan. WTO adalah suatu bangunan yang dirancang dan direkayasa oleh manusia. Dan, layaknya suatu bangunan, ia tetap bisa diubah atau jika perlu dibongkar dan dibangun yang baru. Jadi, dunia yang lebih baik adalah suatu harapan, bukan impian belaka.

Akhirnya, epilog di penghujung buku ini, sekali lagi mengajak kita semua mewujudkan suatu dunia yang lebih baik dengan memahami dan mewaspadai apa yang terjadi di WTO. Tetapi, yang lebih penting, kita haruslah bertindak sesuai kemampuan dan tingkatan masing-masing untuk menyumbangkan pada harapan dunia yang lebih baik tersebut.

Perlu dicatat bahwa buku ini tidak memuat segala sesuatu tentang WTO, suatu kesepakatan setebal 700 halaman ditambah dengan berbagai keputusan yang diambil dalam sepuluh tahun terakhir ini. Banyak hal hanya disentuh kulitnya saja, atau sebagian kecil saja. Tetapi harapan saya buku ini memberikan gambaran cukup untuk memahami beberapa prinsip dasar dan kesepakatan di WTO serta dampaknya. Sejauh mungkin buku ini mengungkapkan kasus yang terjadi berkaitan dengan kesepakatan WTO. Bagi yang berminat melakukan telaah lebih rinci, di bagian akhir buku ini, saya menyajikan satu senarai sumber pustaka rujukan dan tapakmaya (*websites*) yang dapat anda telusuri sendiri.

Ada banyak teman dan pihak yang membantu saya menyusun buku ini. Sumbangsih utama diberikan oleh Martin Khor, teman yang sudah saya kenal lebih dari 15 tahun. Tanpa dia mungkin saya tidak akan pernah tertarik mempelajari isu global dan WTO. Martin memberikan inspirasi, informasi, bimbingan, dan selalu siap membantu. Binny Buchori, Indah Suksmaningsih, Bonnie Setiawan, Sukma Violetta, dan Maria Hartiningsih, memberikan dorongan dan bujukan untuk terlibat lebih jauh dalam urusan WTO pada saat-saat saya bimbang. Terima kasih pada Roem Topatimasang yang menyunting buku ini agar lebih mudah dan enak dibaca. Terima kasih kepada rekan-rekan di INSISTPress, terutama Mamad Mustofa, yang terus menerus memperingatkan saya untuk menyelesaikan buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada

Lutfiyah Hanim yang membantu memburu beberapa data, serta Forum WTO yang menyediakan wadah diskusi sehingga bisa saya kutip dalam buku ini. Seperti biasanya, sumbangsih tak terhingga diberikan oleh Deepak D. Ghindwani, teman hidup yang memberikan ruang luas untuk berkarya.

Akhir kata, seluruh kesalahan dan kelemahan buku ini tetaplah tanggung jawab saya sendiri.

Denpasar, Januari 2005
Hira Jhamtani